



Media: Tribun Jogja

Hari: Jumat

Tanggal: 09 Oktober 2020

Halaman: 7

Sultan Teken Surat dari Buruh untuk Presiden

YOGYA, TRIBUN - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, menanggapi tuntutan para buruh terkait pengesahan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja, Kamis (8/10). Para perwakilan buruh yang tergabung dalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIY membawa beberapa tuntutan.

Antara lain mendesak pemerintah DIY agar mengirim surat kepada Presiden RI Joko Widodo dan DPR RI supaya mencabut Undang-undang (UU) Cipta Kerja. Dari pertemuan dengan organisasi pekerja buruh, Gubernur DIY berbicara sebagai bentuk aspirasi, karena sebelumnya MPBI terlebih dahulu berkirin surat kepada Sri Sultan Hamengku Buwono X.

"Mereka menyampaikan aspirasinya supaya saya bisa memfasilitasi, untuk mengirim surat kepada Presiden sebagai aspirasi masyarakat khususnya warga buruh, saya sanggup dengan surat yang akan saya tanda tangani," kata Sultan, sesuai pertemuan itu di kompleks Kepatihan, Kamis (8/10).

Sultan menambahkan, penandatanganan surat tersebut sebagai respons Gubernur DIY terhadap aspirasi para buruh. Hal kedua, terkait Bantuan Langsung Tunai (BLT) para buruh belum bisa turun, agar segera difasilitasi. Selain itu, Sultan juga menanggapi terkait cara peningkatan kesejahteraan para buruh melalui aktivitas-aktivitas koperasi, yang memungkinkan dari para perusahaan agar dapat ditingkatkan. "Hal seperti ini yang bisa saya fasilitasi," tegasnya.

Hal ketiga, Raja Yogyakarta itu juga menyoroti para massa aksi dari kalangan mahasiswa, pelajar, serta masyarakat umum. "Seperti yang saya sampaikan kemarin. Kalau demonstrasi itu kan aspirasi, kalau telah mendapat izin dari polisi, mestinya demonstrasi itu dimungkinkan. Dan itu saya fasilitasi, asalkan protokol kesehatan dilakukan," tegasnya.

Akan tetapi, hal selanjutnya Sultan meminta untuk tetap menjaga jarak dan mematuhi protokol, serta tidak ada aksi vandalis. "Jogja dengan masyarakatnya tidak pernah punya ikhtidak baik untuk membangun anarki, untuk

aktivitas yang dilakukan kelompok-kelompok masyarakat. Bukan karakter kita untuk berbuat anarkis di kotanya sendiri. Itu saja yang bisa saya sampaikan," urainya.

Secara garis besar Pemda DIY tidak dalam konteks mendukung aksi massa tersebut dilakukan. Melainkan, hanya sebagai fasilitator atas keresahan para buruh untuk disampaikan melalui surat kepada Presiden.

Desakan

Salah satu perwakilan MPBI DIY, Irsyad Ade Irawan mengatakan, seluruh massa dari kalangan MPBI telah memutuskan mundur begitu Sri Sultan HB X menerima audiensinya. Sebab Raja Yogyakarta telah menyetujui dan memfasilitasi permintaan para buruh.

Permintaan para buruh tersebut berupa desakan agar Ngarsa Dalem berkirin surat kepada Presiden RI Joko Widodo dan DPR RI supaya segera mencabut UU Cipta Kerja. "Kami pastikan massa MPBI sudah mundur dari konsentrasi massa. Karena tuntutan kami kepada pemerintah DIY telah direspons oleh Gubernur DIY," katanya.

Pertemuan para buruh dengan Sri Sultan yang didampingi Sekda DIY, Kadarmanta Basakara Aji, serta Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti tersebut berlangsung tertutup di dalam Bangsal Kepatihan.

Selain mendesak Presiden Joko Widodo dan DPR RI untuk segera mencabut pengesahan UU Cipta Kerja, Irsyad juga meminta Pemda DIY merealisasikan peningkatan kesejahteraan buruh melalui koperasi di masing-masing perusahaan. "Kami minta ke depan perusahaan-perusahaan harus dibuatkan koperasi, serta kami minta kepada pemerintah DIY untuk membuat koperasi induk khusus untuk kalangan buruh, agar ada peningkatan ekonomi," imbuhnya.

Mereka juga mendesak supaya Disnakertrans DIY segera melakukan kajian Kebutuhan Layak Hidup (KHL) untuk penetapan UMK 2021. Terkait kerusuhan yang terjadi, MPBI menegaskan seluruh anggotanya telah mundur. (hda/jsf)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005